

# **KEKAYAAN SUMBERDAYA PESISIR LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DI PAPUA VERSUS STATUS KESEJAHTERAAN NELAYAN ORANG ASLI PAPUA**

**Selvi Tebay**

Staff dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan  
Universitas Papua  
Email: [s.tebay@unipa.ac.id](mailto:s.tebay@unipa.ac.id)

## **Pendahuluan**

Provinsi Papua memiliki luas sekitar 312.224,37 km<sup>2</sup>, berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai pulau Papua, dengan garis pantai sepanjang 1.170 mil laut dengan luas perairan territorial mencapai 45.510km<sup>2</sup> yang didalamnya mengandung berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomis penting. Sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah laut 106.598,9 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 12.455 km serta teridentifikasi sebanyak 3.146 pulau kecil (Badan Informasi Geospasial, 2018, DKP Papua Barat, 2010) dan berbagai potensi sumberdaya perairan lautnya.

Potensi sumberdaya perikanan di Tanah Papua tersebar pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 717 yang meliputi perairan utara Papua, WPP 718 meliputi perairan Arafura dan WPP 715 meliputi perairan Teluk Berau, Sorong dan Raja Ampat. Secara berturut-turut potensi perikanan di Perairan Papua Barat sebesar 1,054,695 ton/tahun, 2,637,565 ton/tahun dan 1,242,526 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan sudah melebihi dari jumlah tangkapan yang dibolehkan terjadi pada ikan pelagis kecil dan lobster untuk WPP 717; ikan karang untuk WPP 718, dan Lobster, kepiting dan cumi untuk WPP 715 (PSDI KKP, 2017). Kondisi tangkap lebih pada jenis ikan tertentu di WWP tersebut dapat mengancam jenis lain yang secara ekonomis menguntungkan dan memiliki nilai pasar tinggi, misalnya kerapu dan kakap.

Perairan Papua Barat dihuni oleh lebih dari 1.700 spesies ikan karang (Allen, 2009) dan 600 spesies karang keras yang merupakan 75% dari total species karang dunia dengan tingkat keanekaragaman tertinggi yang pernah tercatat di dunia (Veron et al. 2009; Wallace et al. 2011). Karena itu, perairan Papua Barat menjadi episentrum Coral Triangle. Selain ekosistem terumbu karang, perairan Papua Barat memiliki dua ekosistem pesisir lain yaitu ekosistem mangrove dan

ekosistem padang lamun. Kedua ekosistem pesisir ini merupakan salah satu yang terluas di dunia. Ekosistem ini mendukung kehidupan dugong, larva ikan, buaya air asin (Mangubhai et al. 2012), menyediakan perlindungan dan pangan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah ini (Glew et al. 2015).

Selain itu, perairan laut Papua Barat menyediakan sumberdaya perikanan yang potensial terutama bagi perikanan tangkap skala kecil (Bawole 2017), jasa lingkungan untuk kegiatan pariwisata (UNIPA, 2015; Nikijuluw dkk, 2017). Teridentifikasi sebanyak 15 spesies paus dan lumba-lumba yang memanfaatkan perairan ini sebagai jalur migrasi maupun sebagai daerah agregasi. Pesisir Papua Barat terdapat pantai peneluran penyu belimbing (leatherback turtle) terbesar di dunia (Benson et al. 2007 dan 2011, Tapilatu & Tiwari, 2007; Hitipeuw et al. 2007), termasuk tempat peneluran penyu jenis lain, seperti penyu hijau (green turtle), penyu lekang (olive ridley turtle), dan penyu sisik (hawksbill turtle).

### **Ironi Kekayaan Lau dan Kesejahteraan Nelayan Orang Asli Papua**

Diatas kekayaan sumberdaya Laut Tanah Papua hiduplah manusia Papua dengan kapasitas yang masih terbatas tergolong dalam kelompok tradisional. Akibat kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut di Papua telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan hidup. Mulai dari Illegal, Unreported dan Unregulated Fising, data dan informasi yang belum memadai, tumpang-tindih kebijakan sektoral, kegiatan pembangunan secara parsial dan evaluasi kinerja pembangunan yang masih sulit dilakukan telah berdampak pada degradasi habitat dan ekosistem esensial di wilayah pesisir. Banyaknya permasalahan pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau dapat melahirkan konflik kepentingan antar pengguna sumberdaya dan mengancam ketersediaan stok sumberdaya perikanan.

Kegiatan perikanan tangkap menjadi sumber utama pendapatan dan menjadi sumber protein utama bagi 75% rumah tangga bagi masyarakat di Papua (Glew et al. 2012), baik orang asli Papua dan non Papua yang bersama hidup diatas Tanah Papua. Kompetisi pemanfaatan sumberdaya perikanan, pesisir dan Pulau Pulau Kecil antara nelayan Orang Asli Papua dan Non Papua terlihat dengan adanya perbedaan penguasaan alat dan teknologi, ruang pemanfaatan penangkapan yang sama, kegagalan pembangunan, marginalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus. Minimnya akses Pasar dalam menumbuhkan ekonomi RT Nelayan Asli Papua, terbatasnya kepemilikan modal dan penguasaan teknologi yang juga tidak berpihak.

Disamping itu regulasi yang mengatur pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau pulau kecil di Papua juga masih bersifat umum, belum adanya regulasi khusus dalam bentuk Perdasi/Perdasus pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau pulau kecil di tanah papua yang memberikan ruang/wilayah khusus bagi orang asli Papua. Salah satu kebijakan tentang pengakuan wilayah kelola masyarakat Adat maka perlu ditetapkan wilayah wilayah Kelola MHA di atas Tanah Papua daam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

Dengan berlakunya Kepmen KP No 8 Tahun 2018 tentang tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka semua wilayah MHA di atas Tanah Papua perlu mendapatkan pengakuan terhadap eksistensi dan wilayah kelola (*boundary theritory*). Ironisnya adalah MHA di atas Tanah Papua telah mendiami tanah leluhurnya dan berinteraksi dengan sumberdayanya dari generasi ke generasi, dengan menggunakan aturan berupa norma adat yang dipercayai turun temurun tanpa sebuah aturan tertulis dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab..

Membatasi ruang gerak pemanfaatan bagi masyarakat Papua terlihat dari pembatasan wilayah kelola yang juga ditunjang oleh terbatasnya modal yang dimiliki baik dari segi modal usaha, modal alat tangkap dan armada tangkap, akses pasar, industri dan teknologi bahkan SDM bidang kelautan yang perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan generasi Emas Papua (OAP) yang siap bersaing bahkan menguasai sumberdaya yang ada dengan kapasitas ekonomi, sosial dan kelembagaan yang kuat. Dengan demikian kesejahteraan Nelayan dan Masyarakat Asli Papua yang menggantungkan hidupnya kepada sumberdaya pesisir, laut dan pulau pulau kecil di Tanah Papua dapat sejahtera dan hidup Damai diatas Tanah Leluhurnya.